



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7882-7892

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perbandingan Sistem Parlemen di Pemerintahan Federal Australia dan Jerman dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor^{1✉}, Aliyya Zikrina², Flariska Erfaryndra³,
Raja Oloan Tumanggor⁴

(1,2,3) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

(4) Program Studi Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ludgerius.maruli@office.ui.ac.id^{1✉}

Abstrak

Studi ini menganalisis perbandingan sistem parlemen antara pemerintahan federal Australia dan Jerman dalam menangani pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan antara sistem parlemen Australia dan Jerman dalam menangani pandemi Covid-19 yang mendunia. Perbedaan yang hadir dapat dibuktikan dengan teori asimetri yang dijelaskan oleh Tarlton mengenai adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara unit-unit politik yang menjadi sasaran utama di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan diperoleh hasil bahwa dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan federal seperti Australia dan Jerman dibutuhkan optimalisasi dominasi kekuasaan ketika menangani kasus darurat yang terjadi, seperti Covid-19. Adanya dominasi kekuasaan yang timpang mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan seperti dari durasi pengesahan dan efek atas pengaplikasian kebijakan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi tingkat demokrasi di sebuah negara.

Kata Kunci: *analisis perbandingan, pemerintahan federal, sistem parlemen*

Abstract

This study analyzes the comparison of the parliamentary systems between the Australian and German federal governments in dealing with the Covid-19 pandemic. There are differences between the Australian and German parliamentary systems in dealing with the global Covid-19 pandemic. The differences that exist can be proven by the asymmetry theory explained by Tarlton regarding the unequal distribution of power between political units which are the main targets in parliament. This research uses qualitative methods with literature studies and results show that in a country with a federal government system such as Australia and Germany, it is necessary to optimize the dominance of power when dealing with emergency cases that occur, such as Covid-19. The existence of unequal power dominance affects parliament's flexibility in making decisions. This also has a big influence on the effectiveness of the policies implemented, such as the duration of ratification and the effect on policy implementation. Apart from that, this also affects the level of democracy in a country.

Keyword: *comparative analysis, federal government, parliamentary system*

PENDAHULUAN

Federasi menjadi salah satu sistem pemerintahan yang cukup populer di masa modern. Di banyak benua, federasi dipilih menjadi suatu sistem pemerintahan yang cocok bagi negara-negara yang memprioritaskan otonomi setiap daerahnya. Bagi beberapa negara, federasi nampak menjadi bentuk pemerintahan yang ideal melihat bahwa federasi terdiri atas beberapa negara-negara bagian yang turut ambil bagian dalam pengaturan negara pusat seperti membentuk reformasi konstitusi. Negara bagian dalam negara federal berfungsi mendorong devolusi otoritas politik dari struktur terpusat menjadi unit politik otonom daerah (Buchanan, 1995).

Jerman dan Australia menjadi contoh dari implementasi negara federasi pada era modern. Baik Australia maupun Jerman sama-sama memiliki sistem yang menciptakan lingkup kewenangan teritorial yang terpisah, tetapi keduanya berbeda dalam mengalokasikan sumber daya dan mewakili unit-unit konstituen dalam pengambilan keputusan federal. Proses pembentukan negara dalam sejarah di unit-unit konstituen menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi alokasi kekuasaan antara pemerintahan federasi dengan negara bagian, atau yang disebut sebagai *Länder* dalam kasus Jerman. Jerman memiliki 16 *Länder* dengan latar belakang pemisahan yang dapat ditarik jauh hingga abad ke-9. Dalam parlemen Jerman, *Länder* memiliki otonomi yang cukup besar dalam hal menentukan nasib mereka sendiri melalui sebuah badan yang bernama *Bundesrat*.

Apabila sistem ini dibandingkan dengan negara bagian Australia yang terdiri atas 2 wilayah teritorial khusus dan 6 negara bagian, parlemen Australia menjadi terlihat lebih fungsional dibanding parlemen Jerman (Thorlakson, 2003). Berbagai perbedaan mekanisme distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan federal ini dapat tercermin secara lebih jauh lagi di kehidupan nyata dalam melihat bagaimana setiap negara federal, dalam hal ini Australia dan Jerman, mengalokasikan kekuasaan dan sumber dayanya ke setiap negara bagian pada saat krisis nasional, tidak terkecuali krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, diperoleh pertanyaan penelitian berupa: Bagaimana perbandingan antara sistem parlemen pemerintahan federal yakni Jerman dan Australia mengenai fleksibilitasnya dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan untuk menangani Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Pertama-tama dikaji landasan teoretis mengenai sistem pemerintahan federal. Kemudian membandingkan sistem parlemen antara dua negara Australia dan Jerman dalam menentukan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui studi perbandingan tersebut kemudian ditarik kesamaan dan perbedaan. Hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Asimetri dalam federasi menurut Charles D. Tarlton

Charles D. Tarlton menjelaskan teori simetri dan asimetri sebagai elemen federalisme untuk mengungkap beragam cara dimana setiap elemen dalam sistem federal dapat berhubungan dengan sistem secara keseluruhan, otoritas pusat, dan setiap negara anggota (Tarlton, 1965). Sistem federal yang simetris mengacu pada unit-unit politik yang terdiri atas wilayah dan populasi yang setara serta ciri-ciri ekonomi, kondisi ekonomi, pola budaya, kelompok sosial, dan institusi politik yang serupa. Masing-masing negara bagian akan menjadi unit terpisah yang mempunyai masalah masing-masing yang penyelesaiannya dianggap paling tepat oleh otoritas lokal, dimana otoritas federal akan dibatasi untuk mengurus dirinya sendiri terkait permasalahan sistem qua federal atau yang perlu koordinasi antar seluruh sistem.

Sebaliknya, sistem federal yang asimetris terdiri atas unit-unit politik yang sesuai dengan perbedaan kepentingan, karakter, dan susunan yang ada dalam masyarakat. Teori asimetris ini menjadi bentuk yang paling umum dari hampir semua negara dengan sistem

federal di luar sana dimana bentuk federalisme yang asimetris ini mencerminkan keberagaman dalam masyarakat luas yang diwujudkan secara politis melalui pemerintah daerah yang mempunyai otonomi dan kekuasaan yang berbeda-beda (Tarlton, 1965).

Teori asimetri ini sendiri kemudian terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama dalam bentuk *de facto*, yang menekankan pada perbedaan atau adanya asimetri antara unit-unit politik dikarenakan oleh hal-hal yang bersifat politis dan internal seperti faktor etnis, budaya, kultur, bahasa, agama, dan lain-lain tergantung dari unit politiknya masing-masing. Kedua, yakni bentuk *de jure*. Bentuk ini menekankan pada adanya perbedaan atau asimetri dalam pemberian dan distribusi kekuasaan, pemberian status, hak otonomi fiskal, dan lain-lain yang biasanya bersifat konstitusional (Sahadžić, 2023).

Pada model utama yang dikembangkan oleh Tarlton, negara Jerman dan Australia termasuk dalam klasifikasi model simetris. Namun, seiring berjalannya waktu, Thorlakson berargumen bahwa pada era modern, terdapat suatu konsep yang disebut sebagai *shared jurisdiction* (yurisdiksi bersama), dimana meskipun terdapat simetri dalam pembagian kekuasaan yang ketat antar tingkat pemerintahan dalam sistem federal, pemisahan seperti itu jarang terlihat dalam praktiknya (Thorlakson, 2011). Sehingga model sistem federal suatu negara seperti Australia dan Jerman saat ini cenderung mengarah pada peningkatan kecocokan dengan sistem asimetris, baik dengan *de jure* dan *de facto*. Pergeseran bentuk ini semakin terlihat melalui tanggapan parlemen kedua negara dalam menghadapi pandemi Covid-19, dimana serangkaian *shared jurisdiction* mempengaruhi pembuatan, pengerahan, dan implementasi kebijakan di negara bagian masing-masing.

Konteks parlemen Australia

Parlemen Australia, yang memiliki nama resmi *Parliament of the Commonwealth of Australia* menganut sistem bikameral (dua kamar), dengan Majelis Tinggi/*Upper House* yang disebut sebagai Senat dan Majelis Rendah/*Lower House* yang disebut sebagai *House of Representatives*. Pembagian dua kamar ini tercantum dalam Konstitusi Australia yang disusun pada tahun 1890, yang menyatakan bahwa yang berdasarkan pada prinsip bahwa pemisahan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan kekuatan pembuatan hukum, termasuk untuk mencegah kontrol oleh satu faksi politik tertentu yang tidak mewakili seluruh masyarakat (Evans, 2016). Saat ini, *House of Representatives* terdiri atas 151 anggota yang mewakili setiap daerah konstituen yang dipilih oleh seluruh warga negara Australia setiap tiga tahun sekali. Sedangkan, Senat terdiri atas 76 senator yang mewakili 12 negara bagian dan 2 wilayah teritorial Australia, yang terpilih untuk masa jabatan selama enam tahun.

House of Representatives pada dasarnya menjadi kunci yang lebih penting dalam pembentukan kebijakan karena memiliki peran sebagai komunikator antara masyarakat dengan pemerintah dan dapat merancang sekaligus turut hadir dalam pengesahan undang-undang. Selain itu, lembaga ini juga memiliki fungsi sebagai penentu partai pemerintah, pengawas administrasi pemerintahan, dan pengontrol anggaran dan pengeluaran pemerintahan. Sedangkan Senat dihadirkan dengan fokus pada fungsi pengawasan, yakni untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi House of Representatives dalam pembuatan undang-undang dan perancangan anggaran.

Konteks parlemen Jerman

Jerman digambarkan sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik federal parlementer. Tidak jauh berbeda dengan Australia, sistem parlemen Jerman juga terdiri dari dua kamar (bikameral), dimana Majelis Tinggi memiliki sebutan *Bundesrat* dan Majelis Rendah-nya disebut sebagai *Bundestag*. Sistem parlemen ini diatur dalam *Basic Law* Jerman yang telah berlaku sejak tahun 1949 dengan beberapa amandemen yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks masa modern saat ini. Anggota *Bundestag* dipilih oleh seluruh warga negara Jerman setiap empat tahun sekali dan saat ini terdiri atas 734 anggota. Di sisi lain, anggota *Bundesrat* tidak dipilih oleh rakyat, melainkan didelegasikan oleh pemerintah negara bagian masing-masing dan terdiri atas 69 anggota.

Lembaga *Bundestag* memiliki fungsi penting dalam proses legislasi yakni dapat membuat rancangan undang-undang dan turut hadir dalam melakukan pengesahan undang-undang. Selain itu, fungsi penting lainnya adalah sebagai pengawas atas pemerintahan dari pengawasan atas jalannya pemerintahan dan anggaran dana. Sedangkan fungsi utama *Bundesrat* menekankan pada adanya keadilan yang merata diantara setiap *Länder*. Oleh karena itu, pengesahan undang-undang akan diproses dalam *Bundesrat* agar setiap *Länder* dapat meninjau ulang kembali undang-undang demi kepentingan negara bagiannya.

Struktur legislasi parlemen Australia

Optimalnya, fungsi parlemen legislatif di Australia sebagai pengawas pemerintahan serta membentuk dan mengesahkan kebijakan. Akan tetapi, selama pandemi terjadi ketimpangan dalam pemerintahan Australia secara keseluruhan yang mana mempengaruhi fungsi dari legislatif itu sendiri, dari senat maupun *House of Representative*-nya. Terjadi fenomena asimetris di tubuh pemerintahan Australia karena adanya dominasi kontrol kekuatan dari lembaga eksekutif dalam mengkoordinasi,

merancang, dan membentuk undang-undang atau kebijakan dengan minimnya keikutsertaan parlemen legislatif dalam pengesahan dan proses pembuatan.

Selama pandemi, ada beberapa perubahan yang terjadi. Pertama, adanya perubahan sistem prosedur sidang yang menjadi hybrid dan jadwal sidang yang diperketat. Hal tersebut mempengaruhi efektivitas parlemen dalam mengkaji perubahan undang-undang atau rancangan undang-undang yang ada. Kedua, dibentuknya komite parlemen baru yang dikhususkan untuk mengawasi dan mengeksaminasi aktivitas eksekutif yang cukup mendominasi yakni seperti *The Senate Standing Committee for the Scrutiny of Delegated Legislation*, *COVID-19 Response Committee*, dan lain-lain (Drabsch, 2021).

Fleksibilitas parlemen

Pada masa Covid-19, tentu ada beberapa dinamika dan perubahan yang terjadi dalam tubuh parlemen, terutama pada aspek fleksibilitasnya. Parlemen Australia dianggap kurang fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pembentuk sekaligus pengesah undang-undang. Hal tersebut didorong karena adanya konsentrasi atau dominasi kekuatan di lembaga eksekutif, kebijakan besar dan pengeluaran anggaran yang besar diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, semakin padatnya RUU yang mendesak dengan tekanan kondisi mendesak membuat parlemen harus memotong durasi dalam melakukan pengecekan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurangnya konsultasi, debat dan diskusi di dalam parlemen.

Perlu digarisbawahi bahwa peran parlemen masih dibutuhkan dalam terbentuknya kebijakan dan melakukan pengawasan selama pandemi, Kondisi yang genting dan mendesak membuat pemerintah Australia harus membuat keputusan tegas dan mengurangi perdebatan internal politik. Oleh karena itu, fleksibilitas parlemen yang dikorbankan.

Struktur legislasi parlemen Jerman

Kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Jerman pada tanggal 27 Januari 2020 (Wieler et al. (n.d.)). Namun, sebelum itu, pemerintahan Jerman telah menerapkan langkah antisipasi yang terdiri atas empat elemen yaitu mencegah, mendeteksi, membendung, dan mengobati (*prevent, detect, contain, and treat*). Tindakan ini membuat negara Jerman menjadi salah satu negara yang selangkah lebih maju dalam menangani kasus Covid-19, terbukti dari bagaimana negara Jerman cukup berhasil dalam menekan angka kasus Covid-19 pada gelombang pertama pandemi periode Maret-Mei 2020 (Kropp & Schnabel, 2021).

Sebulan setelah kasus pertama Covid-19 di Jerman, tepatnya pada 27 Februari 2020, sudah terdapat total sebanyak 26 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi. Untuk itu, pemerintahan Jerman membentuk kelompok manajemen krisis nasional antar kementerian. Selanjutnya, pemerintahan mulai melakukan berbagai pembatasan sosial dan penganjuran pembelajaran jarak jauh. Karena berhasil menekan penyebaran kasus virus Covid-19 pada periode-periode awal ini, masyarakat Jerman bersedia memberikan dukungan yang lebih lanjut terhadap berbagai pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tidak sedikit diantara mereka yang bahkan merasa bahwa pemerintah perlu lebih menegaskan pembatasan dengan lebih keras lagi.

Namun, berbagai usaha preventif serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman ini mulai mengalami penurunan khususnya pasca semakin mewabahnya pandemi pada pertengahan tahun 2020. Akibatnya, pemerintah Jerman perlu menerapkan kebijakan yang lebih ekstensif dan efektif lagi dalam menghadapi pewabahan ini, sekaligus penanganan tuntutan massa yang mulai memiliki opini yang berbeda terhadap pembatasan pemerintahan dari periode gelombang pertama sebelumnya.

Fleksibilitas parlemen

Distribusi kekuasaan pemerintahan Jerman dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi cukup menarik untuk diamati. Pasalnya, *Bundesrat* yang biasanya lebih memiliki fungsi pengawasan dan penasihat justru memainkan peran yang dominan dalam penanganan pandemi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena konstitusi Jerman dalam *Infection Protection Act* (IfSG) yang dijadikan hukum federal pada tahun 2001 memberi wewenang kepada *Länder* (yang perlu diingat berpartisipasi melalui *Bundestag*) untuk menerapkan langkah-langkah pembatasan.

Dalam penerapannya, meskipun antar *Länder* menjalani proses koordinasi melalui rapat *Bundesrat*, tetapi proses konversi kebijakannya tetap penuh intrik dan perdebatan antar semua pihak. Alhasil, terdapat perbedaan tindakan yang diambil oleh tiap *Länder* terutama dalam berbagai hal termasuk pembatasan ruang publik. Beberapa *Länder* juga menyimpang dari perjanjian dengan pemerintah federal pada awal gelombang kedua pandemi Covid-19 di bulan Oktober.

Melihat dominasi *Bundestag* ini, Kementerian Kesehatan pemerintahan federal mereformasi IfSG pada Maret dan kemudian November 2020. Reformasi pertama pada bulan Maret berupaya untuk berusaha memberi sebagian wewenang kepada menteri

kesehatan federal untuk mengeluarkan perintah undang-undang tanpa persetujuan *Bundesrat*. Namun, reformasi ini dianggap masih kurang spesifik dan efektif, sehingga direformasi lagi pada November 2020 untuk memberikan spesifikasi batasan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh *Bundesrat* dan *Länder* yaitu untuk mengatur pelarangan acara dan pertemuan; larangan bepergian; kewajiban memakai masker; dan penutupan toko-toko dan tempat lainnya.

Meskipun begitu, pada akhirnya, penanganan Covid-19 masing-masing *Länder* tetap berbeda-beda, membuktikan kalau reformasi *IfSG* ini tidak efektif. Salah satu pemicunya adalah meningkatnya demonstrasi pada periode kedua penyebaran wabah Covid-19 ini akibat tidak setujunya masyarakat terhadap terlalu banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat banyak perwakilan *Länder* di *Bundesrat* ragu dalam menerapkan kebijakan pembatasan lebih lanjut lagi. Perbedaan penerapan pembatasan menunjukkan bahwa *Bundesrat* sangat mendominasi segala proses kebijakan terkait dengan *Länder* dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan memperlihatkan hubungan yang tidak setara antara berbagai elemen pemerintahan yang juga terkait dalam pembuatan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, secara garis besar didapati bahwa terdapat perbedaan antara sistem parlemen Australia dan Jerman dalam menangani pandemi Covid-19 yang mendunia. Perbedaan yang hadir dapat dibuktikan dengan teori asimetri yang dijelaskan oleh Tarlton mengenai adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara unit-unit politik yang menjadi sasaran utama yakni di parlemen.

Dijelaskan bahwa bentuk asimetri yang terjadi selama pandemi di Australia adalah adanya distribusi kekuasaan yang dominan pada pihak eksekutif di Australia yang mana mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam mengambil keputusan pada masa pandemi. Dikarenakan dominasi parlemen yang ditekan dan sempit, maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen legislatif bersifat tidak fleksibel dan cenderung mengikuti dominasi kekuatan dari lembaga eksekutif yang kebetulan pada saat pandemi mengalami lonjakan kekuasaan.

Begitu pula dengan Jerman yang mana juga terbukti mengalami bentuk asimetri kekuasaan selama pandemi, yakni dibuktikan dengan adanya dominasi kekuasaan dari salah satu kamar lembaga legislatif nya sendiri, yakni *Bundestag*. Berbeda dengan Australia, dengan adanya dominasi kekuasaan di *Bundestag*, Jerman menjadi cenderung sangat atau bahkan terlalu fleksibel dalam mengambil keputusan selama masa pandemi covid-19. Dilihat dari bagaimana tiap *Länder* dengan mudahnya membentuk kebijakan dan keputusan masing-masing yang minim intervensi dari pusat mengenai perbedaan

implementasi kebijakan dari masing-masing negara bagian.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan federal seperti Australia dan Jerman membutuhkan optimalisasi dominasi kekuasaan ketika menangani kasus darurat yang terjadi, seperti Covid-19. Adanya dominasi kekuasaan yang timpang mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan seperti dari durasi pengesahan dan efek atas pengaplikasian kebijakan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi tingkat demokrasi di sebuah negara, yakni pada dasarnya Australia dan Jerman yang merupakan negara simetris tanpa dominasi kekuasaan yang timpang, akan tetapi dengan adanya dominasi yang timpang membuat satu unit politik terlihat lebih menguasai dari unit politik lain, yang mana tidak menggambarkan demokrasi.

Sejalan dengan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, didapati bahwa terdapat beberapa persamaan antara parlemen Australia dan Jerman dalam konteks struktur dan fungsinya yang sama-sama bikameral dengan Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Perbedaan kecilnya terdapat pada mekanisme pemilihan anggota Majelis Tinggi Jerman yang tidak perlu dipilih oleh rakyat sebagaimana Majelis Tinggi di Australia. Sedangkan, kedua sistem parlemen berbeda dalam segi fleksibilitasnya dalam segi pengambilan keputusan selama pandemi covid-19. Dimana dalam kasus Australia, kekuasaan parlemen yang sangat minim membuat tingkat fleksibilitasnya juga minim. Disisi lain, dalam kasus Jerman, kekuasaan parlemen, yakni Bundestag, sangat mendominasi dimana membuat tingkat fleksibilitas untuk mengambil dan menentukan keputusan sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- About the House of Representatives (n.d.). 2024. Diakses pada 16 April 2024 melalui aph.gov.au: <https://shorturl.at/fimFJ>
- Bang, H. 1998. "David Easton's Postmodern Images". *Political Theory*. 26, 281 - 316. <https://doi.org/10.1177/0090591798026003002>.
- Buchanan, J. 1995. "Federalism As an Ideal Political Order and an Objective for Constitutional Reform". *Publius-the Journal of Federalism*. 25, 19-28. <https://doi.org/10.1093/OXFORDJOURNALS.PUBJOF.A038192>.
- Chilcote, R. H. 2018. *Theories of System and State. Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered*. New York: Routledge. 121-176

- Christian, E., & Kosandi, M. 2021. "Political Distrust terhadap Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Perbandingan antara Australia dan Indonesia". JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 11(1), 1-34.
- Christian, T., et al. 2022. Basic Law for the Federal Republic of Germany. Deutscher Bundestag.
- Constitution of the Federal Republic of Germany (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui bmi.bund.de: <http://surl.li/spysb>
- Distribution of seats in the 20th German Bundestag. (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui [bundestag.de: https://www.bundestag.de/en/parliament/plenary/distributionofseats](https://www.bundestag.de/en/parliament/plenary/distributionofseats)
- Distribution of votes: Composition of the Bundesrat (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui [bundesrat.de: https://www.bundesrat.de/EN/organisation-en/stimmenverteilung-en/stimmenverteilung-en-node.html](https://www.bundesrat.de/EN/organisation-en/stimmenverteilung-en/stimmenverteilung-en-node.html)
- Drabsch, T. 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on parliament. NSW Parliamentary Research Service
- Evans, H. 2016. The Senate and its constitutional role. Dalam *Odgers' Australian Senate Practice*. Canprint Communications. Canberra. 1-40.
- Kelleher, W. 2018. Normative Political Science - as Constituted by the Formal Axiology of Robert S. Hartman and David Easton's Concept of the Political System. . <https://doi.org/10.31124/ADVANCE.7293638.V1>.
- Kropp, S. & Schnabel, J. 2021. "Germany's response to Covid-19." Dalam *Federalism and the Response to Covid-19*. Routledge India. hlm. 84-94.
- Mayangsari, F. R. 2020. "Australia Government Response to COVID-19: Coordination and the Effectivity of Policy". *Jurnal Global & Strategis*, 14 (2), 279.
- Parliament of Australia. 2019. COVID-19 Australian Government roles and responsibilities: *an overview*. Parliament Library
- Parliament of Australia. (n.d.) Parliament of Australia. Retrieved from <https://www.aph.gov.au/>
- Son, K. 2018. "Cybernetic Freedom: David Easton, Systems Thinking, and the Search for Dynamic Stability". *American Political Thought*, 7, 614 - 645. <https://doi.org/10.1086/699907>.
- Thorlakson, L. 2003. "Comparing federal institutions: Power and representation in six federations." *West European Politics*, 26, 1 - 22. <https://doi.org/10.1080/01402380512331341081>.

Wieler, L., et al. (n.d.) Emerging Covid-19 Success Story: The Challenge of Maintaining Progress. Dalam *Exemplars in Global Health*.
<https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/covid-19/germany>

Work of the Senate (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui [aph.gov.au](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Chamber_documents/Senate_chamber_documents):
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Chamber_documents/Senate_chamber_documents